



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARTIYUS
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 65838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.468.040.000**

1. Tanah Seluas 9980 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 8502 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8420 m2/128 m2 di KAB / KOTA
SINTANG, WARISAN Rp. 233.040.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/50 m2 di KAB / KOTA
PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/240 m2 di KAB / KOTA
SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 40.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2002, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2004, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA A5C02R37M2M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 74.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	901.139.934
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.484.179.934
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.484.179.934

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.